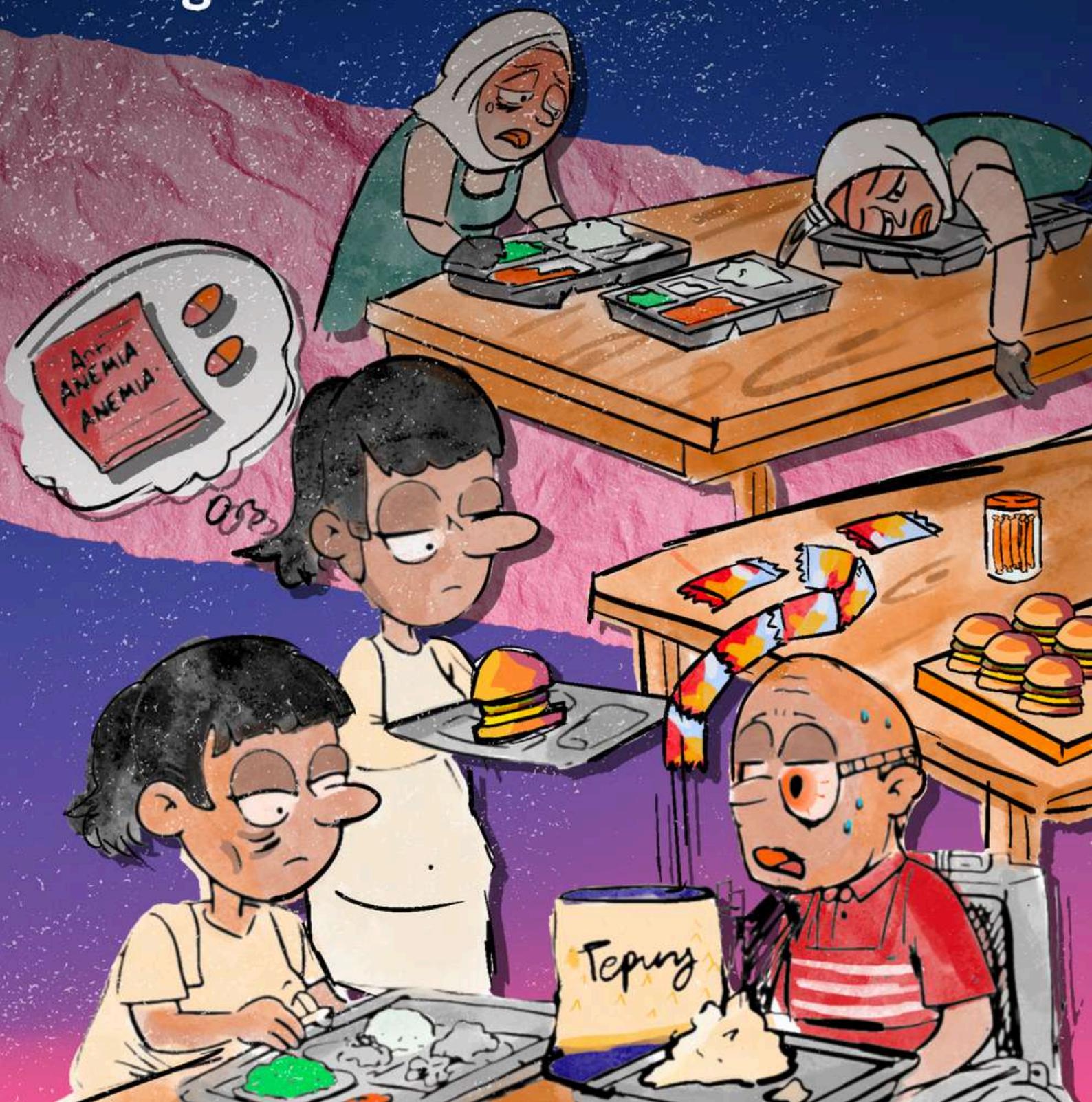


# Peluang dan Tantangan Pengarusutamaan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)* dalam Program Makan Bergizi Gratis





## **TRANSPARENCY INTERNATIONAL INDONESIA 2025**

Transparency International Indonesia (TII) merupakan salah satu chapter Transparency International, sebuah jaringan global NGO antikorupsi yang mempromosikan transparansi dan akuntabilitas kepada lembaga-lembaga negara, partai politik, bisnis, dan masyarakat sipil. Bersama lebih dari 90 chapter lainnya, TII berjuang membangun dunia yang bersih dari praktik dan dampak korupsi di seluruh dunia.

Penanggung Jawab : Danang Widoyoko  
Peninjau : Alvin Nicola dan Misbah Hasan  
Penulis : Izza Akbarani, Agus Sarwono, dan Sahel Muzzammil  
Tata Letak : Isa Ahmad Mujahid  
Desain Sampul : Rida Dzakiyyah

Setiap upaya telah dilakukan untuk memverifikasi keakuratan informasi yang terkandung dalam penelitian ini. Semua informasi diyakini benar pada 31 Oktober 2025. Namun demikian, Transparency International Indonesia tidak dapat menerima tanggung jawab atas konsekuensi penggunaannya untuk tujuan lain atau dalam konteks lain.

[www.ti.or.id](http://www.ti.or.id)

© 2025 Transparency International Indonesia. Seluruh hak cipta dilindungi.

# DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b>	<b>iii</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF</b>	<b>1</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b>	<b>4</b>
a. Latar Belakang	4
b. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	7
<b>II. METODOLOGI PENELITIAN</b>	<b>9</b>
a. Metode Pengumpulan Data	9
b. Metode Analisis Data dan Asesmen	10
c. Batasan Penelitian	15
<b>III. TEMUAN</b>	<b>16</b>
a. Potret Regulasi Program Makan Bergizi Gratis dalam Aspek <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)</i>	33
b. Analisis Kesenjangan Regulasi dan Perencanaan Program Makan Bergizi Gratis dalam Aspek <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)</i>	36
c. Peluang dan Tantangan Pengarusutamaan <i>Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)</i> dalam Program Makan Bergizi Gratis	39
<b>IV. SIMPULAN DAN REKOMENDASI</b>	<b>44</b>
a. Simpulan	44
b. Rekomendasi	45
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>48</b>

# RINGKASAN EKSEKUTIF



Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu Program Hasil Terbaik Cepat pemerintah 2025–2029 untuk mempercepat perbaikan gizi anak Indonesia melalui penyediaan makanan bergizi setiap hari bagi siswa sekolah serta kelompok rentan seperti balita, ibu hamil, dan ibu menyusui. Namun, kajian awal menggunakan *Gender Integration Continuum (GIC) Framework* menunjukkan bahwa desain dan perencanaan MBG masih berada pada kategori **Gender Blind**, yang berarti belum mempertimbangkan perbedaan kebutuhan berbasis gender, disabilitas, dan inklusi sosial dalam seluruh tahap pemilihan dan perencanaan proyek.

Meskipun program ini menargetkan kelompok rentan, dokumen perencanaan awal lebih berfokus pada aspek logistik dan institusional, bukan pada pemetaan kebutuhan spesifik perempuan, anak perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, ataupun kelompok dengan hambatan sosial-ekonomi.



Sumber Foto: Detik.com

Partisipasi bermakna kelompok rentan juga belum menjadi bagian dari proses desain yang selama ini berjalan secara *top-down*, sehingga meningkatkan risiko tokenisme dan berpotensi memperlebar kesenjangan akses terhadap makanan bergizi di sekolah. Selain itu, tidak adanya data terpisah gender dan disabilitas dalam identifikasi penerima manfaat dapat mengakibatkan ketidakmerataan manfaat serta gagal menjangkau anak dengan kebutuhan khusus maupun anak perempuan dengan risiko anemia tinggi.

Kajian ini juga menyoroti minimnya representasi unit dan aktor *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)* dalam forum pengambilan keputusan serta belum adanya mekanisme pengawasan, pengaduan, dan transparansi yang inklusif bagi kelompok rentan. Dengan demikian, akuntabilitas sosial dalam pelaksanaan program masih belum terjamin.

Di sisi lain, terdapat peluang penguatan GEDSI melalui pemberdayaan perempuan dalam rantai penyediaan pangan sekolah dan adaptasi praktik baik internasional, seperti penggunaan pangan lokal, partisipasi komunitas, serta desain menu inklusif sesuai kebutuhan anak penyandang disabilitas dan konteks budaya setempat.

MBG memiliki potensi tinggi memperbaiki status gizi nasional, namun tanpa integrasi GEDSI yang kuat, program ini berisiko tidak tepat sasaran dan dapat memperburuk ketidaksetaraan yang sudah ada. Dengan demikian, terdapat sejumlah aspek penting untuk dimasukkan dalam kerangka perbaikan, seperti integrasi GEDSI dalam kebijakan dan regulasi MBG secara menyeluruh termasuk dalam juknis dan tata kelola penganggaran, penyusunan indikator kinerja terpilih serta sistem monitoring responsif kelompok rentan, pelibatan secara bermakna organisasi perempuan dan disabilitas dalam desain, implementasi, hingga evaluasi program, penguatan mekanisme transparansi dan pengaduan yang mudah diakses, serta mendorong pengadaan dan produksi berbasis komunitas lokal untuk memastikan manfaat ekonomi inklusif.

Uji Coba Program MBG di salah satu Sekolah Dasar di Distrik Manokwari Timur. Sumber Foto: jubi.id





## Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Sumber Foto: Kompas.com

# PENDAHULUAN

## a. Latar Belakang

Kekurangan gizi atau *stunting* masih menjadi problem dan tantangan besar dalam pembangunan sumber daya manusia, khususnya di Indonesia. *Stunting* adalah masalah kurang gizi kronis pada anak yang salah satunya ditandai dengan tinggi badan yang lebih pendek dari standar usianya. Tidak hanya berdampak pada kesehatan fisik anak, *stunting* juga dapat memengaruhi perkembangan kognitif dan potensi anak di masa depan.<sup>1</sup> Kondisi ini berdampak jangka panjang terhadap kualitas kesehatan dan produktivitas generasi muda.

Data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 menunjukkan angka *stunting* nasional masih berada pada angka 19,8%. Meskipun angka ini turun dari tahun sebelumnya (21,5%), upaya berkelanjutan untuk mencapai target jangka panjang dan mempertahankan tren positif harus terus diupayakan mengingat target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) di angka 14% pada tahun 2024. Data SSGI ini menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan, perencanaan program, dan pelaksanaan intervensi yang efektif untuk mengatasi masalah gizi, termasuk *stunting*.<sup>2</sup>

Dalam konteks tersebut, Presiden terpilih periode 2024–2029 Prabowo Subianto merancang Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikoordinasikan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai salah satu program unggulan untuk mempercepat perbaikan gizi anak-anak usia sekolah. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan dilakukan secara bertahap, menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah.<sup>3</sup>

1 Sosialisasi Stunting dalam Rangka Menuju Zero Stunting. [https://www.researchgate.net/publication/378137928\\_Sosialisasi\\_Stunting\\_dalam\\_Rangka\\_Menuju\\_Zero\\_Stunting\\_di\\_Kangkung\\_Kabupaten\\_Kendal](https://www.researchgate.net/publication/378137928_Sosialisasi_Stunting_dalam_Rangka_Menuju_Zero_Stunting_di_Kangkung_Kabupaten_Kendal). Diakses pada 26 Juni 2025.

2 Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 Dalam Angka. <https://repository.badankebijakan.kemkes.go.id/id/eprint/5861/>. Diakses pada 26 Juni 2025.

3 BGN akan Memulai Program MBG Secara Bertahap. <https://www.bgn.go.id/news/artikel/bgn-akan-memulai-program-mbg-sekara-bertahap>. Diakses pada 24 Juni 2025.

Program ini ditujukan membangun sistem ketahanan gizi nasional serta mewujudkan tata kelola gizi dengan menyediakan makanan bergizi setiap hari bagi siswa SD, SMP, SMA Sederajat, dan Santri untuk menurunkan angka *stunting* dan kekurangan gizi, serta meningkatkan konsentrasi belajar dan partisipasi sekolah. Selain itu, program ini juga ditargetkan untuk anak-anak usia di bawah 5 tahun serta ibu hamil dan menyusui. Menurut BGN, menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar Angka Kecukupan Gizi (AKG) harian, dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%.



Menu MBG di salah satu SD Negeri Depok pada Senin (6/10/2025). Sumber Foto: Kompas.com

MBG menjadi salah satu dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029.<sup>4</sup> BGN menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar (3T) dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program.

5

Namun, program berskala nasional seperti MBG memiliki implikasi sosial yang kompleks dan berpotensi menciptakan kesenjangan baru jika tata kelolanya tidak dirancang secara inklusif sejak awal perencanaan program. Berdasarkan pengalaman dari berbagai negara, misalnya India, Brasil, dan Jepang, program makan gratis di sekolah kemungkinan gagal menjangkau kelompok yang paling rentan jika tidak disertai data terpisah berdasarkan gender, disabilitas, dan status sosial ekonomi, tidak mengadopsi pendekatan berbasis komunitas, dan tidak melibatkan aktor lokal dan kelompok rentan dalam desain dan perencanaan programnya sejak awal.

<sup>4</sup> Ini Daftar Lengkap 77 PSN 2025-2029. <https://www.kompas.com/properti/read/2025/03/03/143000021/ini-daftar-lengkap-77-proyek-strategis-nasional-2025-2029>. Diakses pada 24 Juni 2025.

<sup>5</sup> BGN akan Memulai Program MBG Secara Bertahap. <https://www.bgn.go.id/news/artikel/bgn-akan-memulai-program-mbg-sekara-bertahap>. Diakses pada 24 Juni 2025.



Kemiskinan. Sumber Foto: depokpos.com

Kondisi Indonesia yang sangat beragam secara geografis, budaya, serta ketimpangan sosial yang tinggi, memperbesar risiko ini. Sejumlah risiko yang dapat diidentifikasi dalam tahap awal misalnya anak perempuan di daerah tertentu menghadapi norma gender yang membatasi kehadiran mereka di sekolah, anak-anak dengan disabilitas menghadapi hambatan fisik dan sosial dalam mengakses lingkungan sekolah dan makanan, anak dari keluarga termiskin sering kali mengalami kelaparan tersembunyi namun tidak terdata sebagai prioritas.

Lebih lanjut, MBG juga melibatkan rantai distribusi dan pengadaan makanan yang luas, termasuk pelibatan tenaga kerja perempuan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dapur komunitas, dan sekolah. Tanpa panduan perlindungan sosial dan pengakuan kerja perawatan yang, ada potensi terjadinya eksplorasi beban kerja perempuan, terutama pengelola komunitas. Untuk itu, pendekatan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)* sangat penting untuk memastikan bahwa MBG tidak hanya memberikan makanan, tetapi memberdayakan komunitas lokal secara adil serta tidak memperparah ketimpangan.

Anggaran program MBG pada tahun 2025 mencapai Rp99 triliun yang terdiri dari Rp71 triliun eksisting serta Rp28 triliun tambahan anggaran.<sup>6</sup> Namun demikian, tidak terdapat publikasi dokumen anggaran secara transparan yang mengalokasikan pendekatan berbasis GEDSI pada pengelolaan program. Tanpa alokasi anggaran yang jelas berbasis GEDSI, program ini berpotensi hanya memperlebar kesenjangan sosial dan gender.

Berkaca dari sejumlah permasalahan tersebut, pengarusutamaan GEDSI pada program MBG merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan tata kelola yang baik dan akuntabel untuk memastikan bahwa program ini tepat sasaran dan tidak memperburuk kesenjangan yang sudah ada. Selain itu, pengarusutamaan GEDSI menjadi langkah penting untuk memastikan tata kelola program berjalan dengan efektif, mengakomodasi kepentingan kelompok rentan dan penerima manfaat, serta menjamin terpenuhinya hak warga negara secara setara.

Laporan ini bertujuan untuk memberikan analisis awal terhadap **desain** dan **perencanaan** program MBG dari perspektif GEDSI, serta memberikan rekomendasi agar program ini benar-benar inklusif, tepat sasaran, dan berdampak jangka panjang.

## **b. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian**

Penelitian ini difokuskan untuk menilai aspek Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) pada **desain** dan **perencanaan** program khususnya dalam **tahapan pemilihan proyek** yang meliputi pemilihan, uji tuntas, dan persetujuan. Adapun tahapan pemilihan proyek secara rinci dalam tabel berikut:

**Tabel 1.** Tahapan Pemilihan Proyek

<b>1. Pemilihan</b>	<b>2. Uji Tuntas</b>	<b>3. Persetujuan</b>
Perkiraan permintaan	Penilaian, kelayakan, desain awal, penilaian dampak lingkungan dan sosial	Estimasi biaya
Asesmen Kebutuhan	Tinjauan independen terhadap penilaian dan desain awal	Tinjauan eksternal
Pengembangan kebijakan		Persetujuan anggaran
Skrining dan prioritas		

<sup>6</sup> BGN Minta Tambah Rp28 T, Anggaran MBG 2025 Sentuh Rp99 T. <https://validnews.id/ekonomi/bgn-minta-tambah-rp28-t-anggaran-mbg-sentuh-rp99-t>. Diakses pada 27 September 2025.

**Ruang lingkup kajian ini adalah:**

1. Mengidentifikasi analisis awal terhadap desain dan perencanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya pada aspek *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*;
2. Menelaah kesenjangan dalam tata kelola program khususnya pada aspek GEDSI.

**Kajian ini dilakukan dengan tujuan untuk:**

1. Memahami kerangka program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditinjau dari aspek *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*;
2. Membuka ruang bagi masyarakat sipil untuk meninjau dan mengawasi Proyek Strategis Nasional khususnya dari aspek *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*;
3. Memberikan rekomendasi kepada pemangku kepentingan terkait agar program MBG diimplementasikan secara inklusif, tepat sasaran, dan berdampak jangka panjang.

Sumber Foto: bogor.pojoksatu.id



# METODOLOGI PENELITIAN

Untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menilai desain dan perencanaan aspek *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)* dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), metode penelitian pada kajian ini menggunakan instrumen penilaian *Gender Integration Continuum (GIC) Framework*. Pendekatan pada kajian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif yang fokus pada pemahaman mendalam terhadap suatu fenomena melalui pengumpulan data kualitatif seperti observasi dan analisis dokumen (Creswell, 2014). Metode ini bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan fenomena yang terjadi secara alamiah dengan cara yang sistematis, faktual, dan akurat tanpa melakukan intervensi atau manipulasi variabel.

## a. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada kajian ini dilakukan dengan mengolah data sekunder melalui studi literatur. Data sekunder dikumpulkan dan diolah dari sejumlah sumber laman resmi pemerintah pusat dan daerah, kementerian dan lembaga, serta laman dari media pemberitaan, organisasi, dan laman lainnya. Adapun dokumen yang diolah berupa data terkait program makan bergizi di sekolah dan tata kelola kelembagaan yang dikumpulkan mencakup dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2025-2029, Rencana Kerja Pemerintah, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, dan Peraturan di tingkat Kementerian/Lembaga, dokumen anggaran, dan dokumen terkait lainnya.

Selain itu, data sekunder lain yang diolah dalam penelitian ini berupa paparan webinar Kementerian/Lembaga, paparan hasil rapat dengar pendapat (RDP) DPR RI dengan Kementerian/Lembaga, literatur kajian terkait pelaksanaan makan bergizi di sekolah, laporan pemerintah, laporan statistik, pemberitaan media, dan dokumen terkait lainnya.

## **b. Metode Analisis Data dan Asesmen**

Upaya-upaya untuk mengintegrasikan gender ke dalam kebijakan atau program perlindungan sosial dapat dikonseptualisasikan dalam sebuah *Gender Integration Continuum (GIC) Framework* atau kontinum integrasi gender, mulai dari yang bersifat diskriminatif gender hingga yang bersifat transformatif gender. Secara khusus, di mana suatu kebijakan perlindungan sosial atau program dinilai berada dalam kontinum ini bergantung pada bagaimana gender dipertimbangkan (atau tidak) dalam siklus pelaksanaan perlindungan sosial mulai dari desain, pelaksanaan, tata kelola, pembiayaan dan sistem pemantauan dan evaluasi serta pada hasil dan dampak yang terkait.<sup>7</sup>

Program-program yang secara aktif mengecualikan kelompok perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya serta kebutuhan mereka dari pertimbangan dan pengambilan keputusan dinilai diskriminatif terhadap gender. Aspek ini mungkin dilakukan tanpa unsur kesengajaan, yang mengakibatkan kurangnya penerapan lensa gender pada desain masalah sehingga kelompok perempuan dan anak perempuan serta kebutuhan gendernya terabaikan. Hal ini dapat dikategorikan sebagai netral gender atau buta gender (jika tidak menimbulkan kerugian lebih lanjut selain menegakkan status quo gender yang tidak setara).<sup>8</sup>

GIC Framework adalah alat penting untuk memastikan bahwa program dan kebijakan tidak hanya menghindari diskriminasi gender, tetapi juga secara aktif mendorong perubahan menuju kesetaraan dan keadilan gender. Pendekatan ini membantu organisasi dan pemerintah menilai posisi mereka dalam spektrum integrasi gender dan merancang strategi untuk bergerak ke arah yang lebih progresif dan transformatif.<sup>9</sup>

7 Gender Responsive Age Sensitive Social Protection. <https://www.unicef.org/innocenti/media/6086/file/UNICEF-Gender-Responsive-Age-Sensitive-Social-Protection-2020.pdf>. Diakses pada 19 Mei 2025.

8 *Ibid.*

9 *Ibid.*



Ilustrasi *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)*.

GIC Framework digunakan sebagai alat analisis untuk memahami, mengidentifikasi, dan mengatasi ketidaksetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program atau kebijakan pembangunan. Kerangka ini membantu memetakan peran, akses, kontrol, serta kebutuhan laki-laki dan perempuan dalam suatu masyarakat atau organisasi. Secara lebih rinci, GIC Framework digunakan dengan tujuan mengidentifikasi perbedaan peran, tanggung jawab, akses, dan kontrol antara laki-laki dan perempuan, menganalisis penyebab serta dampak ketidaksetaraan gender, dan merancang intervensi atau kebijakan yang responsif dan adil terhadap kebutuhan gender.

Menilai sebuah program, kebijakan, atau intervensi menggunakan GIC Framework berarti mengidentifikasi sejauh mana upaya tersebut memperhatikan, mengakomodasi, atau mentransformasi isu gender. GIC Framework menilai sebuah program dengan lima kategori dari diskriminatif hingga transformatif yang secara kuantitatif terbagi dalam skor 1-5. Semakin rendah skor, maka program dinilai tidak sensitif hingga diskriminatif dalam aspek gender.

**Tabel 2.** Kategori Gender Continuum

Kategori	Deskripsi	Penilaian dalam Skor
Gender Discriminatory	Program atau kebijakan yang secara sadar atau tidak sadar memperkuat stereotip, membatasi akses, atau mendiskriminasi salah satu gender.	1
Gender Blind	Tidak mempertimbangkan perbedaan kebutuhan dan pengalaman gender, sehingga berisiko memperkuat ketidakadilan yang sudah ada.	2
Gender Sensitive	Menyadari adanya perbedaan gender dan mengambil langkah untuk mengurangi hambatan, namun masih dalam batasan sistem yang ada.	3
Gender Responsive	Secara aktif mengidentifikasi dan mengatasi kebutuhan serta kerentanan spesifik gender sejak dalam desain dan perencanaan program.	4
Gender Transformative	Melangkah lebih jauh dengan menantang dan mengubah norma, kebiasaan, dan struktur sosial yang menyebabkan ketidaksetaraan gender, serta mendorong perubahan sosial yang berkelanjutan.	5

\*Diolah dari berbagai sumber.

Dalam menilai program, GIC Framework digunakan untuk menganalisis desain dan perencanaan program yang meliputi peninjauan dokumen program, kebijakan, dan intervensi hingga mengidentifikasi upaya pemangku kepentingan untuk mengumpulkan data terpisah gender, analisis peran dan kebutuhan gender, serta strategi untuk mengatasi ketidaksetaraan. Dalam melakukan asesmen, desain pertanyaan panduan digunakan untuk menilai posisi program khususnya tahapan proyek pada kategori gender continuum.

Desain pertanyaan panduan meliputi aspek apakah program mengabaikan atau memperkuat norma gender yang diskriminatif, bagaimana program mengakomodasi kebutuhan setiap gender dan kelompok rentan dalam akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat hingga, apakah program secara aktif menentang dan mengubah norma, struktur, atau kebijakan yang mendasari ketidaksetaraan gender.<sup>10</sup>

<sup>10</sup> *ibid.*

Secara ideal, penilaian secara kolektif dan justifikasi perlu dilakukan secara partisipatif untuk menempatkan posisi dan memberikan skor di gender continuum serta memberikan alasan dan justifikasi yang jelas atas asesmen yang dilakukan. Pada tahap lanjutan, evaluasi dampak dan *output* program perlu dilakukan untuk melihat apakah terjadi perubahan yang signifikan dalam akses, kontrol, partisipasi, dan manfaat atau pemberdayaan gender. Selain itu, evaluasi juga diperlukan untuk meninjau apakah program menghasilkan perubahan dalam norma atau struktur sosial yang lebih berkeadilan terhadap semua gender.

### **Indikator Utama untuk Mengklasifikasikan Pendekatan Gender**

Mengklasifikasikan pendekatan gender dalam suatu program, proyek, atau kebijakan memerlukan serangkaian indikator utama yang dapat digunakan untuk menilai sejauh mana aspek gender diperhatikan dan diintegrasikan. Berikut adalah indikator-indikator utama yang secara luas digunakan:

**Tabel 3.** Indikator dan Klasifikasi Pendekatan Gender

No	Indikator	Deskripsi
1	Akses	Mengukur sejauh mana setiap gender dan kelompok rentan memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh informasi, sumber daya, fasilitas, dan layanan sejak dalam tahap perencanaan.
2	Partisipasi	Menilai tingkat keterlibatan aktif setiap gender dan kelompok rentan dalam proses perencanaan program atau kegiatan serta keterlibatan dalam diskusi/musyawarah, pengambilan keputusan, dan kepemimpinan di setiap tahap pemilihan proyek.
3	Kontrol	Menilai sejauh mana setiap gender dan kelompok rentan memiliki kontrol atau kekuasaan untuk membuat keputusan penting terkait sumber daya, kebijakan, atau manfaat dari program sejak dalam tahap perencanaan.
4	Manfaat	Menilai apakah manfaat dari program atau kebijakan dirasakan secara adil oleh semua gender, serta meninjau adanya perubahan positif dan peningkatan kapasitas atau kesejahteraan yang dapat dihasilkan dari program sejak dalam tahap perencanaan.

\*Diolah dari berbagai sumber.

Selain keempat indikator yang telah disebutkan, indikator kuantitatif lainnya dapat digunakan untuk menilai program dalam kerangka gender continuum. Dalam konteks pengukuran di tingkat nasional atau daerah, indikator seperti Usia Harapan Hidup (UHH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Pengeluaran Per Kapita (PpK) terpilah gender merupakan komposir pembentuk Indeks Pembangunan Gender (IPG).

Selain itu, indikator Kesehatan Reproduksi, Pemberdayaan, dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) juga digunakan untuk menilai ketimpangan gender melalui Indeks Ketimpangan Gender (IKG). IPG dan IKG merupakan ukuran agregat yang digunakan untuk mengklasifikasikan tingkat pembangunan kesetaraan gender di suatu wilayah.

Adapun indikator pemenuhan hak bagi penyandang disabilitas dirumuskan dalam Rencana Aksi Nasional Penyandang Disabilitas (RAN PD) dan Rencana Aksi Daerah Penyandang Disabilitas (RAD PD). Pemenuhan gizi bagi perempuan disabilitas dan anak dengan disabilitas tertuang dalam Sasaran Strategis 7 RAN PD maupun RAD PD, yakni 'Akses dan Pemerataan Layanan Kesehatan bagi Penyandang Disabilitas'. Ada dua kebijakan sebagai turunan dari Sasaran Strategis 7 ini yang dapat dikaitkan dengan program MBG, yakni Peningkatan Kemampuan Penyedia Layanan Kesehatan untuk Memenuhi Kebutuhan Penyandang Disabilitas dan Mendorong Pelibatan Penyandang Disabilitas dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). Dalam konteks Program MBC, Badan Gizi Nasional (BGN) selaku penyelengara program MBG dan Direktorat Kesehatan dan Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan mempunyai tanggungjawab pencapaian Sasaran Strategis 7 tersebut.



2

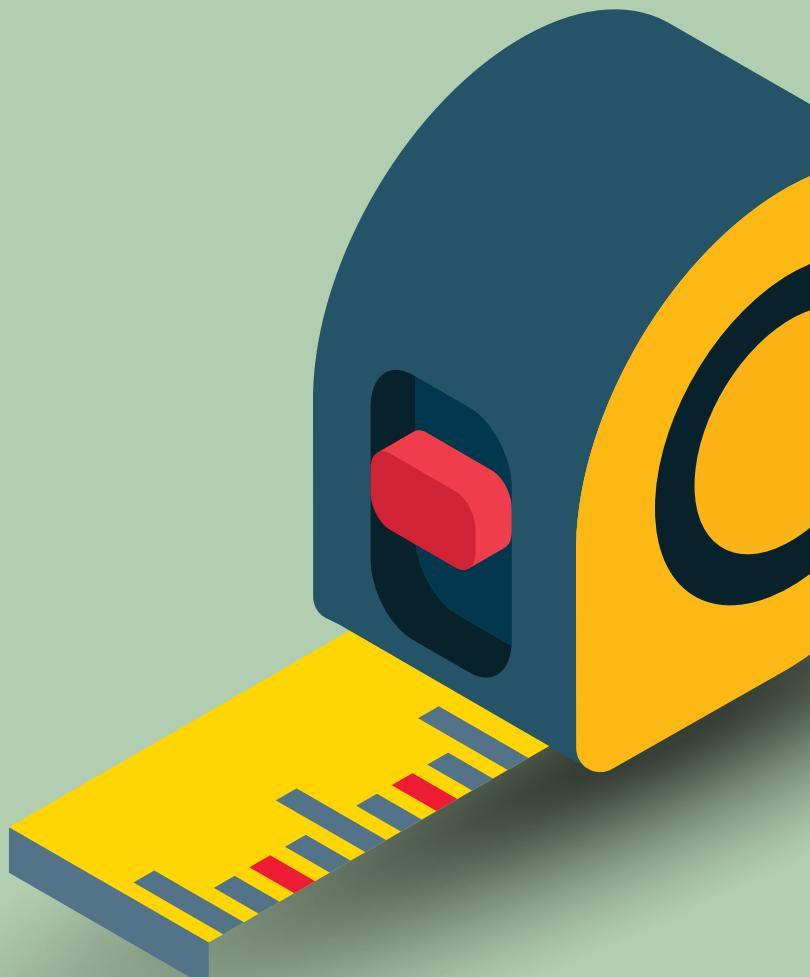
**kebijakan sebagai turunan dari Sasaran Strategis 7 ini yang dapat dikaitkan dengan program MBG, yakni:**

- 1 Peningkatan Kemampuan Penyedia Layanan Kesehatan untuk Memenuhi Kebutuhan Penyandang Disabilitas.
- 2 Mendorong Pelibatan Penyandang Disabilitas dalam Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS).

### c. Batasan Penelitian

Batasan dalam penelitian ini adalah asesmen dan analisis data dilaksanakan oleh peneliti secara mandiri, belum melibatkan penerima manfaat, penyedia, dan kelompok perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, serta kelompok rentan lainnya (menggunakan metode *Expert Judgement*)<sup>11</sup>. Selain itu, penelitian ini berfokus pada desain dan perencanaan awal program (belum sampai pada tahap implementasi program).

<sup>11</sup> Expert Judgement adalah proses penilaian terhadap suatu instrumen, konten, atau kebijakan oleh peneliti atau individu yang memiliki keahlian dan pengalaman yang relevan di bidang tertentu, dengan tujuan memastikan kualitas dan kesesuaian dengan tujuan penelitian. Proses ini sangat penting untuk memastikan validasi isi (content validity) dari suatu alat ukur atau kebijakan, terutama ketika data kuantitatif sulit diperoleh.



# TEMUAN

## ASESMEN PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS DALAM KERANGKA GENDER INTEGRATION CONTINUUM

Proses penilaian menggunakan kerangka Gender Integration Continuum pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan untuk mengidentifikasi dan menganalisis di tahap awal terhadap perencanaan dan desain dalam pelaksanaan program MBG, khususnya pada aspek *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion* (GEDSI) serta menelaah kesenjangan dalam tata kelola program khususnya pada aspek GEDSI. Adapun hasil penilaian beserta analisisnya tertera dalam tabel berikut:

**Tabel 4.** Penilaian Program Makan Bergizi Gratis dalam Kerangka Gender Integration Continuum

Tahapan Pemilihan Proyek	Indikator	Pertanyaan Penilaian	Temuan	Skor (1-5)	Kategori Gender Continuum
<b>Pemilihan</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Perkiraan permintaan</li><li>• Asesmen kebutuhan</li><li>• Pengembangan kebijakan</li><li>• Skrining dan prioritas</li></ul>	<b>Akses</b> (Kesempatan memperoleh sumber daya, informasi, layanan)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Apakah proposal proyek mengidentifikasi hambatan akses bagi perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, atau kelompok rentan lainnya?</li><li>• Apakah perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok rentan memiliki akses terhadap informasi mengenai proyek sejak tahap awal?</li></ul>	<p>1. Secara umum, dokumen awal MBG lebih menekankan aspek logistik, infrastruktur dapur, dan koordinasi antar institusi daripada mengidentifikasi hambatan berbasis gender atau kerentanan sosial secara eksplisit.</p> <p>Kekosongan yang teridentifikasi: Tidak terdapat analisis komprehensif mengenai kesenjangan akses terhadap makanan bergizi berdasarkan lokasi geografis, kondisi disabilitas, peran gender (misal peran pengasuhan perempuan), atau status sosial-ekonomi.</p> <p>Belum ada pemetaan hambatan akses fisik bagi siswa penyandang disabilitas, seperti lokasi distribusi makanan,</p>	2	<b>Gender Blind (Buta Gender)</b>

			<p>jenis kemasan, atau waktu penyajian.</p> <p>Belum ada penilaian akses kultural atau normatif, terutama bagi masyarakat adat yang mungkin memiliki praktik konsumsi pangan atau jadwal berbeda.</p> <p><b>2.</b> Tidak ada indikasi mekanisme penyebaran informasi yang inklusif dan partisipatif sejak tahap pemilihan. Akses informasi lebih terpusat pada pejabat pemerintah daerah dan pemangku kepentingan pendidikan (kepala sekolah/dinas), tanpa pelibatan langsung komunitas sekolah, termasuk orang tua siswa dari kelompok rentan.</p> <p>Tidak ditemukan bukti penggunaan media atau saluran informasi alternatif (seperti bahasa daerah, format audio/visual bagi difabel netra atau tuli, atau pertemuan langsung dengan komunitas/masyarakat adat).</p> <p>Kekurangan pendekatan GEDSI dalam informasi awal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada strategi komunikasi untuk menjangkau kelompok dengan keterbatasan literasi atau konektivitas digital.</li> <li>• Tidak ada diseminasi dalam bentuk yang mudah diakses bagi perempuan yang bekerja di sektor informal atau tinggal di wilayah terpencil.</li> </ul>		
	<b>Partisipasi</b> (Keterlibatan dalam proses dan pengambilan keputusan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah proses identifikasi dan seleksi proyek melibatkan kelompok perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya?</li> </ul>	<p><b>1.</b> Belum ada bukti kuat bahwa proses identifikasi dan seleksi MBG dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan kelompok rentan.</p> <p>Proyek MBG dilaksanakan</p>	2	<b>Gender Blind (Buta Gender)</b>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah ada bukti keterlibatan aktif mereka dalam penilaian kebutuhan?</li> </ul>	<p>sebagai bagian dari janji kampanye politik dan menggunakan pendekatan top down, bukan dari proses penjaringan aspirasi dari bawah ke atas (<i>bottom-up</i>).</p> <p><b>2.</b> Tidak tersedia informasi publik yang memadai bahwa komunitas lokal, organisasi perempuan, disabilitas, atau masyarakat adat dilibatkan secara formal atau informal pada tahap perumusan awal proyek.</p> <p>Perencanaan awal tampak lebih banyak didorong oleh target nasional makro (misal: mengatasi stunting dan kemiskinan ekstrem), namun belum didampingi pendekatan lokal yang responsif konteks sosial budaya.</p>		
	<b>Kontrol</b> (Kekuasaan dalam membuat keputusan dan mengelola sumber daya)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Siapa saja pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengambilan keputusan akhir atas pemilihan proyek?</li> <li>Apakah perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya punya representasi atau pengaruh dalam forum pengambilan keputusan?</li> </ul>	<p><b>1.</b> Pada tahap pemilihan MBG sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), pemangku kepentingan utama yang terlibat dalam pengambilan keputusan meliputi:</p> <p>Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) – memimpin koordinasi program.</p> <p>Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) – sebagai pelaksana utama (terutama untuk siswa sekolah).</p> <p>Bappenas – menyusun dan mengevaluasi kebijakan strategis dan menyelaraskan dengan RPJMN dan agenda prioritas nasional.</p> <p>Badan Gizi Nasional – terkait dengan standar gizi dan kesehatan anak.</p>	2	<b>Gender Blind (Buta Gender)</b>

		<p>Sekretariat Kabinet dan Kantor Staf Presiden – memberikan arahan dan penyelarasan politik strategis.</p> <p>Pemda (dinas pendidikan, kesehatan, sosial) – sebagai pelaksana teknis di daerah.</p> <p>Pihak swasta dan organisasi masyarakat sipil – terbatas, dan umumnya dilibatkan dalam diskusi pelengkap, bukan dalam keputusan final.</p> <p>Namun, tidak ada bukti kuat bahwa kelompok perempuan, kelompok rentan, dan kelompok penyandang disabilitas secara langsung dilibatkan dalam forum pengambilan keputusan akhir di tingkat nasional, terutama pada tahap penyaringan dan penetapan program MBG sebagai prioritas nasional dan proyek strategis nasional.</p> <p><b>2. Minim representasi langsung:</b> Forum pengambilan keputusan tingkat pusat didominasi oleh aktor negara dan teknokrat kementerian, dengan minim representasi dari kelompok perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan organisasi masyarakat sipil.</p> <p>Tidak ada mekanisme kuota atau inklusi formal untuk partisipasi GEDSI dalam forum perencanaan dan penilaian awal program. Tidak ditemukan pelibatan organisasi perempuan, disabilitas, atau adat dalam penyusunan dokumen kebijakan MBG (misalnya dalam RKP, RPJMN, atau bahkan daftar PSN).</p> <p>Asesmen kebutuhan cenderung universal, bukan berbasis kerentanan.</p>	
--	--	---	--

			Analisis kebutuhan pada tahap awal lebih menekankan pada angka kemiskinan dan stunting nasional, tanpa pembobotan khusus untuk kondisi kelompok rentan seperti anak perempuan, anak dari kelompok minoritas, atau anak penyandang disabilitas.		
	<b>Manfaat</b> (Penerima manfaat, perubahan positif, dsb.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah proyek yang diusulkan menyebut kelompok penerima manfaat secara terpisah (misalnya: kelompok perempuan dan kelompok penyandang disabilitas)?</li> <li>Apakah ada analisis dampak terhadap ketimpangan sosial/gender dalam justifikasi proyek?</li> </ul>	<p><b>1.</b> Kelompok sasaran utama umumnya disebut sebagai seluruh siswa sekolah dasar dan menengah, tanpa selalu dijabarkan secara terpisah menurut jenis kelamin, disabilitas, atau status sosial-ekonomi.</p> <p>Dalam beberapa dokumen kebijakan atau pidato, disebutkan bahwa program ini mendukung “anak-anak dari keluarga kurang mampu” atau “anak di daerah terpencil”, namun masih bersifat umum.</p> <p>Kelompok rentan seperti anak perempuan, anak penyandang disabilitas, anak dari komunitas adat, dan anak yang mengalami kekurangan gizi kronis belum secara konsisten diidentifikasi sebagai prioritas penerima manfaat.</p> <p>Analisis GEDSI:  Ketidadaan disaggregasi data penerima manfaat (berdasarkan gender, disabilitas, status sosial) dapat menyebabkan ketimpangan dalam implementasi program.</p> <p>Tanpa penjabaran kelompok terpisah, program ini berisiko tidak menjangkau anak-anak yang paling rentan atau memiliki kebutuhan gizi khusus.</p> <p><b>2.</b> Justifikasi program lebih banyak berfokus pada isu umum kekurangan gizi, stunting, dan kebutuhan</p>	2	<b>Gender Blind (Buta Gender)</b>

		<p>pangan anak usia sekolah.</p> <p>Belum ada analisis eksplisit tentang bagaimana ketimpangan gender, disabilitas, atau status sosial-ekonomi dapat memengaruhi akses anak terhadap makanan bergizi di sekolah.</p> <p>Misalnya, tidak dibahas apakah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anak perempuan lebih sering absen sekolah karena beban kerja rumah tangga.</li> <li>• Anak penyandang disabilitas mengalami kesulitan mobilitas untuk menerima makanan serta kandungan bahan makanan yang digunakan tidak sesuai dengan kebutuhan anak penyandang disabilitas (kebutuhan pangan khusus).</li> <li>• Anak dari keluarga miskin atau komunitas adat menghadapi hambatan struktural untuk mengakses gizi seimbang.</li> </ul> <p>Analisis GEDSI:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Justifikasi proyek belum secara eksplisit mengkaji akar ketimpangan sosial/gender yang bisa memperburuk malnutrisi.</li> <li>• Tanpa analisis ini, strategi intervensi mungkin tidak cukup responsif terhadap kebutuhan spesifik kelompok paling rentan.</li> </ul>			
<b>Uji Tuntas</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penilaian, kelayakan, desain awal, penilaian dampak lingkungan &amp; sosial.</li> </ul>	<b>Akses</b> (Kesempatan memperoleh sumber daya, informasi, layanan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah proyek mengidentifikasi hambatan akses spesifik yang dialami perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya terhadap manfaat proyek?</li> </ul>	<p><b>1. Perempuan:</b> Hambatan belum secara eksplisit diidentifikasi, terutama bagi perempuan kepala keluarga, pekerja informal, atau ibu yang tidak memiliki akses informasi atau keputusan dalam komunitas.</p>	2	<b>Gender Blind (Buta Gender)</b>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tinjauan independen terhadap penilaian &amp; desain awal.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah proyek menyediakan alternatif teknis atau sosial untuk memastikan akses inklusif sejak awal?</li> </ul>	<p><b>2. Penyandang disabilitas:</b> Belum tersedia bukti kuat bahwa proyek ini mengidentifikasi hambatan akses bagi anak-anak penyandang disabilitas (misalnya kebutuhan pangan khusus, hambatan mobilitas ke sekolah, atau sistem distribusi non-aksesibel).</p> <p><b>3. Kelompok rentan lainnya</b> (anak jalanan, anak dari keluarga miskin ekstrem, komunitas adat, dll): Belum ada asesmen terdokumentasi terhadap kondisi lokal dan ragam kebutuhan spesifik mereka. Banyak dari kelompok ini berada di luar sistem pendidikan formal, dan karenanya tidak otomatis tercakup dalam skema MBG.</p> <p>Temuan Umum:</p> <p>Alternatif teknis: Belum tersedia informasi apakah mekanisme distribusi makanan mempertimbangkan kebutuhan anak-anak dengan disabilitas (misalnya yang memerlukan makanan lunak/khusus, atau tidak bisa makan sendiri). Sistem pengadaan dan distribusi tampak masih bersifat generik (satu menu untuk semua).</p> <p>Alternatif sosial: Belum jelas apakah ada strategi komunikasi yang menjangkau komunitas rentan (misalnya melalui bahasa lokal, penyuluhan berbasis komunitas, atau kerja sama dengan organisasi penyandang disabilitas dan kelompok perempuan lokal). Tidak ada indikasi bahwa proses konsultasi dilakukan secara inklusif sejak tahap desain.</p>		
---	---	---	--	--

			<p>Beberapa potensi solusi yang dapat diterapkan (namun belum tampak di dokumen proyek awal):</p> <p>Menyediakan opsi layanan makanan di luar sekolah (bagi anak tidak sekolah). Kolaborasi dengan PKK, kelompok perempuan, atau organisasi disabilitas untuk mengidentifikasi kebutuhan lokal.</p> <p>Pelibatan kader lokal/institusi komunitas untuk penyaluran makanan secara langsung di wilayah sulit akses.</p>		
	<p><b>Partisipasi</b> (Keterlibatan dalam proses dan pengambilan keputusan)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah proyek mendokumentasikan partisipasi perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya dalam proses konsultasi dan uji tuntas?</li> <li>• Apakah masukan dari perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya digunakan untuk menyesuaikan desain proyek?</li> </ul>	<p><b>1.</b> Dokumentasi partisipasi kelompok rentan umumnya masih terbatas. Berdasarkan praktik umum dalam proyek berskala nasional seperti MBG, partisipasi sering kali diukur dari jumlah pertemuan atau pelibatan lembaga formal seperti dinas pendidikan atau organisasi masyarakat. Namun, catatan eksplisit mengenai pelibatan kelompok rentan secara terpisah (perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dll.) sering kali tidak dipublikasikan atau tidak lengkap.</p> <p><b>2.</b> Risiko partisipasi simbolik (tokenisme) masih tinggi, terutama bila partisipasi hanya bersifat konsultatif pasif (misalnya melalui survei tertutup atau FGD yang tidak inklusif secara waktu/tempat/bahasa).</p> <p><b>3.</b> Belum terlihat adanya mekanisme pendokumentasian suara perempuan dan kelompok marginal secara sistematis, seperti pelibatan organisasi perempuan, kelompok disabilitas lokal, atau tokoh adat dalam tim perancang kebijakan MBG.</p>	2	<b>Gender Blind (Buta Gender)</b>

			<p>Tidak ada bukti kuat yang menunjukkan bahwa masukan dari kelompok rentan digunakan secara eksplisit dalam desain awal MBG, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyesuaian menu bergizi untuk kebutuhan khusus (anak disabilitas, daerah adat dengan pantangan budaya).</li> <li>• Penyesuaian waktu distribusi makanan bagi anak perempuan (yang mungkin punya beban kerja rumah tangga lebih tinggi).</li> <li>• Fasilitas penyajian makanan yang memperhatikan aksesibilitas penyandang disabilitas.</li> </ul> <p>Indikasi adaptasi proyek umumnya bersifat umum dan teknokratik, misalnya memperhatikan standar gizi dari Kemenkes, tanpa memasukkan preferensi lokal berbasis gender, budaya, atau disabilitas.</p> <p>Jika pun ada respons terhadap kelompok rentan, bukan hasil dari proses konsultasi yang bermakna.</p>		
	<b>Kontrol</b> (Kekuasaan dalam membuat keputusan dan mengelola sumber daya)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya memiliki keterwakilan dalam mekanisme pengambilan keputusan proyek selama uji tuntas?</li> <li>• Apakah proyek memungkinkan masyarakat terdampak untuk mengajukan penolakan atau revisi berbasis risiko sosial?</li> </ul>	<p><b>1.</b> Minimnya representasi langsung: Tidak terdapat bukti kuat bahwa perempuan, penyandang disabilitas, atau kelompok rentan secara aktif dilibatkan dalam tim pengambilan keputusan pada tahap uji tuntas. Penilaian proyek sebagian besar dikendalikan oleh aktor nasional dan sektoral (seperti Bappenas dan Kementerian terkait), tanpa kerangka inklusi partisipatif yang sistematis.</p> <p><b>2.</b> Ketergantungan pada data agregat: Pendekatan pengambilan keputusan cenderung berbasis data makro dan teknokratik, yang mengabaikan realitas interseksionalitas</p>	2	<b>Gender Blind (Buta Gender)</b>

			<p>(misalnya perempuan dengan disabilitas, atau anak perempuan dari masyarakat adat) dalam menjangkau manfaat program.</p> <p><b>3.</b> Ketiadaan forum konsultatif yang mengikat: Jika pun terdapat forum konsultatif (seperti FGD atau dialog dengan tokoh masyarakat), keterlibatan kelompok rentan bersifat simbolik dan tidak dijamin memiliki daya tawar dalam mempengaruhi keputusan desain proyek.</p> <p><b>1.</b> Ketiadaan mekanisme free, prior and informed consent (FPIC): Dalam dokumen uji tuntas, belum tampak prosedur yang memungkinkan masyarakat untuk menolak atau meminta penyesuaian program berdasarkan potensi dampak negatif (seperti perubahan peran pengasuhan dalam rumah tangga, potensi diskriminasi di sekolah, atau beban tambahan bagi guru).</p> <p><b>2.</b> Mekanisme umpan balik masih <i>top-down</i>: Tidak ada sistem pengaduan atau revisi yang inklusif dan mudah diakses oleh kelompok dengan hambatan (misalnya penyandang disabilitas dan komunitas adat terpencil).</p> <p><b>3.</b> Risiko tokenisme dalam konsultasi sosial: Proses konsultasi lebih bersifat formalitas administratif, tanpa ruang negosiasi atau kontrol dari pihak terdampak. Hal ini melemahkan prinsip akuntabilitas sosial dalam proyek publik berskala nasional seperti MBG.</p>		
	<b>Manfaat</b> (Penerima manfaat, perubahan positif untuk kelompok	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah proyek memiliki analisis distribusi manfaat berdasarkan gender dan kerentanan sosial?</li> </ul>	<p><b>1.</b> Belum tersedia secara publik dokumen uji tuntas MBG yang secara spesifik memuat analisis distribusi manfaat berdasarkan gender, disabilitas,</p>	3	<b>Gender Sensitive (Sensitif Gender)</b>

	rentan, dsb.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah proyek bertujuan secara eksplisit untuk mengurangi kesenjangan sosial atau gender?</li> </ul>	<p>masyarakat adat, atau kelompok rentan lainnya.</p> <p>Risiko ketimpangan distribusi manfaat cukup tinggi bila proyek tidak secara eksplisit mengidentifikasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah anak perempuan memiliki akses dan kontrol yang sama atas makanan bergizi di sekolah?</li> <li>Apakah anak dari keluarga miskin, penyandang disabilitas, atau kelompok minoritas mendapatkan perlakuan afirmatif dalam pelaksanaan program?</li> </ul> <p>Pengumpulan data terpilah berdasarkan gender dan status sosial ekonomi tampaknya belum menjadi standar dalam proses perencanaan dan asesmen manfaat.</p> <p><b>2.</b> Dalam narasi resmi MBG (misalnya pidato presiden dan dokumen ringkas proyek), tujuan utama difokuskan pada pemenuhan gizi dan penurunan stunting, bukan secara eksplisit pada pengurangan ketimpangan gender atau sosial.</p> <p>Tidak ada rujukan eksplisit dalam desain program terhadap:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>SDG 5 (Kesetaraan Gender)</li> <li>Strategi GEDSI nasional atau internasional</li> </ul> <p>Namun, potensi penguatan GEDSI tetap terbuka, mengingat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Perempuan (terutama ibu dan guru perempuan serta PKK) sering terlibat dalam rantai penyediaan makanan.</li> <li>Anak perempuan dan anak dari keluarga miskin sangat diuntungkan jika</li> </ul>	
--	---------------	---	--	--

			intervensi dirancang secara inklusif.		
<b>Persetujuan</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Estimasi biaya</li> <li>• Tinjauan eksternal</li> <li>• Persetujuan anggaran</li> </ul>	<b>Akses</b> (Kesempatan memperoleh sumber daya, informasi, layanan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah rencana proyek menyertakan desain inklusif bagi perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan?</li> <li>• Apakah dokumen akhir proyek mengandung analisis akses berdasar gender dan disabilitas?</li> </ul>	<p><b>1.</b> Sebagian besar dokumen perencanaan awal MBG, terutama dalam estimasi biaya dan rencana distribusi, belum menunjukkan perencanaan teknis maupun anggaran yang secara eksplisit mengakomodasi kebutuhan kelompok rentan.</p> <p>Misalnya: Tidak ditemukan rencana spesifik untuk aksesibilitas fisik (disabilitas) dalam distribusi makanan di sekolah.</p> <p>Tidak ada pemetaan kebutuhan khusus untuk anak-anak perempuan, terutama terkait akses aman terhadap makanan (misal: kondisi sanitasi, risiko kekerasan, atau stigma).</p> <p>Belum ada alokasi biaya tambahan untuk pendampingan atau penyesuaian sarana bagi anak dengan disabilitas atau gangguan makan (berkebutuhan khusus).</p> <p><b>2.</b> Dokumen persetujuan proyek cenderung mengedepankan pendekatan universal ("untuk semua anak sekolah"), tanpa analisis terpisah terkait hambatan atau kebutuhan berdasarkan gender, disabilitas, atau usia.</p> <p>Tidak ditemukan gender and disability access assessment sebagai bagian dari tinjauan eksternal sebelum anggaran disetujui.</p> <p>Tinjauan eksternal lebih fokus pada efisiensi distribusi logistik dan potensi dampak ekonomi lokal, tanpa integrasi</p>	2	<b>Gender Blind (Buta Gender)</b>

			<p>perspektif GEDSI dalam pembahasannya.</p>		
	<b>Partisipasi</b> (Keterlibatan dalam proses dan pengambilan keputusan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah masukan dari perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya selama tahap konsultasi dimasukkan dalam versi akhir proyek?</li> <li>Apakah rencana partisipasi lanjutan disiapkan untuk fase pelaksanaan proyek?</li> </ul>	<p><b>1.</b> Dalam dokumen publik dan paparan resmi yang tersedia, belum ditemukan bukti bahwa masukan dari kelompok rentan secara eksplisit dirujuk atau diintegrasikan dalam desain akhir proyek pada tahap persetujuan.</p> <p>Tidak ada ringkasan konsultasi publik inklusif atau dokumentasi hasil dengar pendapat dengan kelompok rentan yang dilampirkan pada naskah kebijakan, ringkasan eksekutif, maupun studi kelayakan yang menjadi dasar persetujuan program.</p> <p>Proses validasi publik atau uji publik cenderung bersifat terbatas dan tidak tampak memiliki pendekatan interseksional yang melibatkan komunitas perempuan, penyandang disabilitas, atau masyarakat adat secara sistematis.</p> <p>Analisis:</p> <p>Hal ini menunjukkan lemahnya mekanisme feed-forward (sistem kontrol) dari partisipasi ke desain akhir, yang berisiko menciptakan kebijakan yang kurang kontekstual terhadap kebutuhan kelompok rentan.</p> <p>Ketiadaan pelibatan ini juga mengindikasikan potensi bias dalam pengambilan keputusan strategis, terutama dalam perumusan standar layanan, cakupan penerima manfaat, dan penganggaran.</p> <p><b>2.</b> Tidak ditemukan rencana partisipasi lanjutan yang terstruktur dan terdokumentasi dengan jelas dalam dokumen perencanaan dan</p>	2	<b>Gender Blind</b> <b>(Buta Gender)</b>

			<p>persetujuan anggaran (dokumen anggaran tidak terpublikasi secara transparan).</p> <p>Dalam estimasi biaya dan kerangka pembiayaan proyek MBG, tidak ditemukan alokasi anggaran khusus untuk fasilitasi partisipasi masyarakat atau pendampingan komunitas.</p> <p>Tinjauan eksternal atau kajian risiko sosial tidak menyoroti pentingnya partisipasi berkelanjutan untuk pemantauan kualitas layanan di tingkat sekolah/komunitas.</p> <p>Analisis: Ini menunjukkan adanya kekosongan mekanisme umpan balik dari kelompok penerima manfaat yang seharusnya menjadi instrumen kontrol sosial dan peningkatan mutu implementasi program.</p> <p>Minimnya rencana partisipatif di tahap ini juga berpotensi melemahkan akuntabilitas sosial dan monitoring berbasis komunitas.</p>		
	<b>Kontrol</b> (Kekuasaan dalam membuat keputusan dan mengelola sumber daya)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Apakah perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya punya kesempatan memberi persetujuan atau penolakan terhadap desain final proyek?</li> <li>Apakah struktur persetujuan proyek mencakup suara dari unit atau aktor GEDSI?</li> </ul>	<p><b>1.</b> Tidak tersedia informasi publik yang menunjukkan adanya mekanisme persetujuan atau penolakan (free, prior, informed consent) dari kelompok rentan terhadap desain akhir proyek MBG.</p> <p>Kelompok perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, atau kelompok marginal lainnya tampaknya tidak dilibatkan dalam proses validasi akhir rancangan proyek.</p> <p>Dalam struktur kebijakan nasional, tahap persetujuan proyek strategis nasional (PSN) lebih bersifat <i>top-down</i>, dengan dominasi</p>	2	<b>Gender Blind (Buta Gender)</b>

		<p>proses internal kementerian teknis dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), serta Kementerian Keuangan untuk alokasi anggaran, tanpa skema formal keterlibatan komunitas.</p> <p>Analisis GEDSI: Ketidakterlibatan kelompok rentan dalam tahap persetujuan akhir menimbulkan kesenjangan kontrol terhadap proyek yang berdampak langsung pada mereka.</p> <p>Ini menunjukkan defisit akuntabilitas sosial, terutama terhadap kelompok yang paling membutuhkan jaminan akses terhadap makanan bergizi.</p> <p><b>2.</b> Tidak ada bukti eksplisit bahwa unit atau pejabat yang menangani isu gender, disabilitas, atau inklusi sosial (misalnya: Kementerian PPPA dsb.) dilibatkan dalam proses persetujuan akhir.</p> <p>Dokumen anggaran atau Rencana Strategis Program tidak menunjukkan adanya komponen validasi GEDSI dalam mekanisme pembiayaan atau pengesahan.</p> <p>Analisis GEDSI: Tidak ditemukannya keterlibatan unit GEDSI dalam proses persetujuan menunjukkan bahwa lensa inklusi tidak terintegrasi secara institusional dalam struktur tata kelola proyek.</p> <p>Hal ini bisa menyebabkan desain proyek tidak mempertimbangkan disparitas akses dan kontrol yang dihadapi kelompok marginal, dan meningkatkan risiko eksklusi mereka dalam implementasi.</p>	
--	--	---	--

	<p><b>Manfaat</b> (Penerima manfaat, perubahan positif untuk kelompok rentan, dsb.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apakah manfaat proyek secara eksplisit ditujukan untuk mengurangi ketimpangan gender dan sosial?</li> <li>• Apakah manfaat sosial diukur dalam indikator proyek?</li> </ul>	<p><b>1.</b> Tujuan umum MBG adalah meningkatkan status gizi peserta didik, terutama di tingkat SD dan SMP. Namun, dalam dokumen publik yang tersedia, belum secara eksplisit dinyatakan bahwa program ini bertujuan mengurangi ketimpangan gender atau sosial.</p> <p>Ketimpangan gizi yang berbasis gender dan sosial (misalnya: lebih tingginya prevalensi anemia pada remaja perempuan; atau kurangnya akses gizi anak dari keluarga miskin, penyandang disabilitas, atau masyarakat adat) belum terlihat menjadi fokus dalam argumen manfaat saat penyusunan anggaran.</p> <p>Dalam dokumen RKP, RPJMN, atau pagu indikatif program MBG, belum ditemukan indikator atau alokasi khusus untuk menyasar kelompok rentan secara eksplisit, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anak perempuan di usia remaja (SMP),</li> <li>• Anak penyandang disabilitas,</li> <li>• Anak dari wilayah 3T atau keluarga sangat miskin.</li> </ul> <p><b>2. Analisis:</b> Indikator proyek yang ditemukan lebih fokus pada indikator output teknis, seperti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah siswa yang menerima makanan bergizi,</li> <li>• Jumlah sekolah yang menjalankan program,</li> <li>• Manfaat sosial jangka menengah, seperti: <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Peningkatan partisipasi sekolah anak perempuan,</li> <li>ii. Perbaikan status gizi berdasarkan jenis kelamin dan status sosial-ekonomi,</li> </ul> </li> </ul>	2	<b>Gender Blind (Buta Gender)</b>
--	---	--	---	---	---------------------------------------

			<p>iii. Pengurangan beban kerja rumah tangga perempuan (dalam menyiapkan bekal), belum tercermin sebagai bagian dari indikator hasil.</p> <p>Tidak tampak adanya mekanisme evaluasi sosial yang menyertakan dimensi gender atau disabilitas secara eksplisit dalam indikator kinerja proyek.</p>		
--	--	--	--	--	--

Berdasarkan hasil asesmen program MBG pada aspek GEDSI, didapatkan bahwa desain dan rancangan program MBG **terindikasi tidak mempertimbangkan perbedaan kebutuhan dan pengalaman gender, anak (laki-laki/perempuan), penyandang disabilitas (laki-laki/perempuan serta ragam disabilitasnya, dan kelompok rentan lainnya, sehingga berisiko memperkuat ketidakadilan yang sudah ada (Gender Blind)**. Lebih rinci terkait faktor-faktor yang menyebabkan indikasi tersebut, dijabarkan sebagai berikut:

**a. Potret Regulasi Program Makan Bergizi Gratis dalam Aspek *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)***

Sebagai salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029, Makan Bergizi Gratis (MBG) mempunyai sejumlah regulasi yang menjadi landasan pelaksanaan program. Adapun regulasi yang dimaksud meliputi:

- Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang APBN 2025 yang mengatur alokasi dana program strategis nasional MBG;
- Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
- Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Penunjukan Badan Gizi Nasional yang menetapkan Badan Gizi Nasional sebagai pelaksana utama MBG beserta sasaran penerima, termasuk peserta didik, anak di bawah lima tahun, ibu hamil, dan ibu menyusui;

- Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2025, yang memberikan petunjuk teknis mengenai penggunaan dana untuk MBG serta prioritas pada peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat berbasis beragam, bergizi seimbang, dan aman;
- Surat Keputusan Deputi Bidang Penyaluran Badan Gizi Nasional (BGN) Nomor 2 Tahun 2024 mengenai petunjuk teknis (juknis) operasional MBG.

Dalam RPJMN 2025-2029, disebutkan bahwa salah satu sasaran utama Visi Indonesia Emas 2045 adalah daya saing sumber daya yang meningkat dengan target Indeks Modal Manusia mencapai 0,73. Selain itu, tahapan pertama arah kebijakan RPJPN 2025-2029 salah satunya disebutkan transformasi sosial yang berfokus pada penuntasan pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial dan peningkatan kualitas SDM untuk membentuk manusia produktif. Program MBG merupakan salah satu program yang dicanangkan dalam Asta Cita ke 4 yaitu memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas dimana program ini menjadi program Prioritas Pemerintah Tahun 2025-2029 dan Program Hasil Terbaik Cepat.

**Tabel 5.** Program Hasil Terbaik Cepat

<b>Program Hasil Terbaik Cepat Prabowo-Gibran 2025-2029</b>	1. Memberi makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil.
	2. Menyelenggarakan pemeriksaan kesehatan gratis, menuntaskan kasus TBC, dan membangun Rumah Sakit lengkap berkualitas di kabupaten.
	3. Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.
	4. Membangun sekolah-sekolah unggul terintegrasi di setiap kabupaten, dan memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu renovasi.
	5. Melanjutkan dan menambahkan program kartu-kartu kesejahteraan sosial serta kartu usaha untuk menghilangkan kemiskinan absolut.
	6. Menaikkan gaji ASN (terutama guru, dosen, tenaga kesehatan, dan penyuluhan) TNI/POLRI, dan pejabat negara.
	7. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa dan kelurahan, Bantuan Langsung Tunai (BLT), dan menjamin penyediaan rumah murah bersanitasi baik untuk yang membutuhkan, terutama generasi milenial generasi Z, dan masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).
	8. Mendirikan Badan Penerimaan Negara dan meningkatkan rasio penerimaan negara terhadap produk domestik bruto (PDB) ke 23%.

Sumber: RPJMN 2025-2029

Program MBG diklaim untuk turut berkontribusi dalam penurunan tingkat kemiskinan ekstrem serta peningkatan penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal. Hal ini tercermin dalam strategi utama penanggulangan kemiskinan dengan upaya membangun SDM dan perluasan akses ekonomi. Selain itu, dalam dokumen RPJMN 2025-2029 disebutkan bahwa pembangunan manusia seutuhnya bertumpu pada pemenuhan layanan dasar, pembangunan modal manusia, dan pembangunan modal sosial budaya yang ketiganya ditopang oleh pendekatan siklus hidup, pengarusutamaan gender dan inklusi sosial, serta penduduk tumbuh seimbang.

Program MBG sebagai salah satu proyek strategis nasional ditetapkan dan dilaksanakan melalui mekanisme Rencana Kerja Pemerintah. Untuk memastikan Proyek Strategis Nasional berjalan sesuai dengan rencana, dilakukan langkah-langkah pengendalian dan

evaluasi kesiapan serta kinerja pelaksanaannya serta diterapkan manajemen risiko pembangunan nasional. Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tersebut, dapat dilakukan pemutakhiran Proyek Strategis Nasional yang dilakukan secara terintegrasi dengan mekanisme RKP.

Dalam dokumen RPJMN 2025-2029, Proyek Strategis Nasional dirancang sebagai proyek atau program (kumpulan proyek) yang memiliki sifat strategis, terukur, dan berdampak signifikan pada pencapaian sasaran RPJMN Tahun 2025-2029 khususnya Program Prioritas Presiden termasuk Program Hasil Terbaik Cepat terutama untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, mengurangi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan, serta yang mendorong pemerataan pembangunan. Program MBG direncanakan untuk dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota di seluruh provinsi secara bertahap dan akan dikembangkan secara menyeluruh sampai tahun 2029. Adapun instansi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program MBG yaitu:

**Tabel 6.** Instansi Pelaksana Program MBG

Instansi Pelaksana	
Instansi Pengampu	Badan Gizi Nasional
Instansi Kontributor	Kementerian Kesehatan
	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah
	Kementerian Agama
	Kementerian Pertanian
	Badan Pangan Nasional
	Kementerian Kelautan dan Perikanan
	Kementerian Koperasi
	Kementerian Usaha Kecil dan Menengah
	Badan Pengawas Obat dan Makanan
	Kementerian Pekerjaan Umum
	Kementerian Lingkungan Hidup

	Kementerian Desa PDT
	Pemerintah Daerah

Sumber: RPJMN 2025-2029

Dalam struktur instansi pelaksana program MBG tersebut, tidak terdapat aktor atau unit dan instansi/lembaga yang secara khusus mendesain program dengan pendekatan terhadap aspek GEDSI. Selain itu, forum pengambilan keputusan hanya didominasi pemerintah pusat, instansi pengampu, dan instansi kontributor tanpa pelibatan aktor atau unit yang menaruh perhatian terhadap aspek GEDSI. Selain itu, tidak terdapat mekanisme pengawasan dan pengaduan yang dapat dijangkau semua pihak dan bersifat inklusif.

Pendanaan RPJMN Tahun 2025-2029 diutamakan untuk pelaksanaan delapan Prioritas Nasional termasuk program MBG yang masuk dalam Prioritas Nasional 4. Dalam dokumen perencanaan, Prioritas Nasional 4 membutuhkan pendanaan APBN sebesar Rp3.147.395,5 miliar sedangkan Non APBN sebesar Rp5.972.182,3 miliar. Namun demikian, tidak dijelaskan lebih lanjut alokasi rinci dari pendanaan tersebut termasuk bagaimana anggaran tersebut dialokasikan secara inklusif.

Lebih lanjut, dalam dokumen perencanaan disebutkan bahwa pengembangan menu pangan lokal didorong dengan tetap menjamin kecukupan kandungan gizi, keberagaman, kualitas, keamanan, dan keterjangkauan makanan. Penggunaan sumber pangan lokal diutamakan dengan memperhatikan alternatif bahan penukar dan preferensi masyarakat lokal. Namun demikian, tidak disebutkan secara rinci bagaimana menu pangan tersebut dapat menjangkau penyandang disabilitas secara aman serta bagaimana menu pangan tersebut dapat memenuhi kebutuhan anak/remaja perempuan yang rentan terhadap risiko anemia di rentang usia 13-18 tahun.

## ***b. Analisis Kesenjangan Regulasi dan Perencanaan Program Makan Bergizi Gratis dalam Aspek *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)****

Program MBG diklaim pemerintah untuk menargetkan kelompok rentan, anak-anak dari berbagai jenjang sekolah, anak balita, ibu hamil, dan ibu menyusui sebagai sasaran utama. Selain itu, kelompok penyandang disabilitas juga ditargetkan menjadi penerima

manfaat dari program ini tak terkecuali dengan anak berkebutuhan khusus (ABK). Pemerintah menetapkan MBG sebagai program hasil terbaik cepat sebagai upaya untuk memberikan makan bergizi gratis bagi siswa, santri, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita memiliki daya ungkit tinggi terhadap pembangunan modal manusia. Program ini memiliki tujuan utama untuk membangun generasi sehat, cerdas, dan produktif menuju Indonesia Emas tahun 2045.

Namun demikian, dalam perencanaannya partisipasi dan keterlibatan kelompok rentan, khususnya penyandang disabilitas cenderung belum optimal dan terbatas. Kementerian Sosial telah berkomitmen untuk menarget penyandang disabilitas sebagai salah satu kelompok penerima manfaat serta merencanakan mekanisme penyalurannya. Namun, data dan dokumentasi keterlibatan penyandang disabilitas dalam proses perencanaan dan penyusunan kebijakan program MBG baik dalam forum musyawarah warga dan pemangku kepentingan lintas sektor menunjukkan belum banyak ditemui secara formal pada tingkat daerah dan nasional. Selain itu, tidak ditemukan data keterlibatan Forum Anak yang sudah banyak dibentuk di tingkat nasional maupun daerah (provinsi dan Kab/Kota), bahkan di tingkat kecamatan dan desa dalam perencanaan program.

Temuan menunjukkan bahwa pelibatan kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas sangat minim dan dilaksanakan setelah implementasi program berjalan. Sedangkan pada tahap perencanaan strategis, kelompok rentan khususnya penyandang disabilitas tidak dilibatkan secara bermakna. Selain itu, belum ditemukan dokumentasi yang memuat mekanisme resmi yang menjamin keterlibatan kelompok rentan dalam forum perencanaan maupun tim pengarah program. Proses perumusan program cenderung bersifat *top-down*, sebagai bagian dari agenda politik dan janji kampanye serta target makro nasional. Dalam dokumen perencanaan serta forum pengambilan keputusan, representasi aktor/unit GEDSI tidak ditemukan karena didominasi oleh pemerintah pusat dan instansi terkait.

Perencanaan program MBG belum pernah melibatkan masyarakat sipil secara bermakna. Dapat dilihat dari program permakanan yang bergantung pada Pokmas dan program PKH yang dapat bekerja sama dengan organisasi non-pemerintah, meski utamanya

di level pelaksanaan/implementasi program. Berdasarkan pernyataan di media, program MBG juga akan memberdayakan koperasi, bumdes, bumdesma dan institusi sekolah, Pokmas yang terdiri dari perempuan, keluarga, lansia aktif, penyandang disabilitas ringan, organisasi masyarakat sipil, PKK dan karang taruna, yang nampaknya juga di level pelaksana (Bappenas, 2024).

Dalam Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2025 misalnya, belum tercantum secara spesifik tentang kegiatan yang layak mendapatkan pendanaan dari DAK Nonfisik Sub Jenis Pangan terkait yang menyasar kelompok perempuan, komunitas masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya. Selain itu, belum tercantum secara spesifik rencana kegiatan yang menyasar dan melibatkan penyandang disabilitas dan anak berkebutuhan khusus (ABK) dalam implementasi program.

**Tabel 7.** Perencanaan Pengarustamaan GEDSI dalam Program MBG

Aspek GEDSI	Poin Rencana Implementasi oleh Pemerintah	Dasar Regulasi
Kesetaraan Gender/Gender Equality	Sasaran program MBG adalah <ol style="list-style-type: none"> <li>peserta didik pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah di lingkungan pendidikan umum, pendidikan kejuruan, pendidikan keagamaan, pendidikan khusus, pendidikan layanan khusus, dan pendidikan pesantren;</li> <li>anak usia di bawah lima tahun;</li> <li>ibu hamil; dan</li> <li>ibu menyusui.</li> </ol>	Perpres 83/2024, UU 62/2024, Perbadan 1/2025, SDGs
Disabilitas/ Disability	MBG berlaku untuk anak disabilitas, baik sekolah formal/hon-formal; penerapan inklusivitas melalui Kemensos/Daerah. <sup>12</sup>	Perpres 83/2024, Komitmen Kemensos, SDGs
Inklusi Sosial/ Social Inclusion	Penyertaan lansia, kelompok marginal/miskin, UMKM lokal; mekanisme aduan publik.	Perpres 83/2024, Perbadan 1/2025, Aturan Pemerintah Daerah, SDGs

<sup>12</sup> Penyandang Disabilitas Dijanjikan Dapat MBG. <https://kbr.id/articles/indeks/tahun-depan-penyandang-disabilitas-dijanjikan-dapat-makan-bergizi-gratis-2-kali-sehari>.



Sumber Foto: CNN Indonesia

Meskipun dasar regulasi sudah mencantumkan prinsip inklusi, detail teknis pelaksanaan (petunjuk pelaksanaan dan teknis) yang terang dan rigid mengenai implementasi GEDSI masih belum ditemukan secara jelas dan menjadi sorotan penerima manfaat. Sejak tahap pemilihan proyek hingga persetujuan proyek, dokumen perencanaan lebih menitikberatkan pada aspek logistik dan koordinasi antar lembaga tanpa analisis yang lebih mendalam terhadap hambatan akses yang berpotensi dialami oleh kelompok perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya. Selain itu, tidak ada penjelasan dan pemetaan khusus terkait kebutuhan gizi, hambatan yang bersifat fisik, sosial, maupun budaya yang berpotensi dihadapi oleh kelompok rentan tersebut.

Pada indikator manfaat, sasaran penerima manfaat program MBG hanya disebutkan secara umum tanpa disertai dengan data terpisah berdasarkan gender, status sosial, dan disabilitas atau tidak. Tanpa data terpisah, terdapat potensi ketimpangan distribusi manfaat yang mungkin terjadi. Risiko ketidakadilan menjadi tinggi karena perencanaan belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan anak penyandang disabilitas yang membutuhkan makanan khusus serta anak dari komunitas adat dengan praktik pengangguran yang berbeda. Selain itu, tidak ditemukan indikator manfaat sosial yang menargetkan pengurangan ketimpangan gender dan sosial.

### **c. Peluang dan Tantangan Pengarusutamaan *Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI)* dalam Program Makan Bergizi Gratis**

Asesmen mencatat bahwa potensi untuk mengarahkan program MBG menuju Gender Sensitive (Sensitif Gender) masih menjadi peluang di masa yang akan datang. Sebagai contoh, keterlibatan kelompok perempuan dalam Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) serta guru perempuan dapat diperkuat sebagai agen pengelola makanan bergizi meskipun potensi ini belum terintegrasi secara sistematis dalam dokumen perencanaan.

Program makan siang telah dilakukan di sejumlah negara sebelum diimplementasikan di Indonesia. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Global Child Nutrition Foundation (GCNF), pada tahun 2024 terdapat 146 negara yang telah menjalankan program makan siang di sekolah dengan berbagai skala cakupan. Dari sejumlah negara yang telah melaksanakan program tersebut, terdapat praktik baik pengarusutamaan gender dan inklusi sosial yang dapat menjadi peluang diimplementasikan pada program MBG Indonesia di masa mendatang.

Sejumlah negara yang telah melaksanakan program makan siang menunjukkan bahwa dalam perencanaan dan implementasinya, program ini dapat melibatkan kelompok rentan, komunitas adat, serta penyandang disabilitas. Program yang telah dirancang secara inklusif mengombinasikan penargetan kelompok rentan, pengadaan yang inklusif, menu makanan yang sesuai dengan budaya setempat, serta partisipasi bermakna dari komunitas. Berikut secara rinci perbandingan aspek GEDSI pada program makan siang di sejumlah negara:

**Tabel 8.** Komparasi Program Makan Bergizi Gratis dalam Aspek GEDSI di Sejumlah Negara

Aspek	Brasil	Peru	India	Afrika Selatan	Ghana	Chile
<b>Penargetan kerentanan</b>	Cakupan nasional universal	Besar, berlapis keamanan pangan	Universal untuk sekolah negeri kelas 1–8	Fokus 60% termiskin	Anak rentan dengan tata kelola desentralisasi	Siswa dalam kondisi rentan
<b>Gender</b>	Pemberdayaan ekonomi lewat pembelian dari petani keluarga (lebih banyak perempuan)	Keterlibatan ibu/komite lokal di beberapa wilayah	Partisipasi ibu; bukti dampak kehadiran anak perempuan namun terdapat kasus diskriminasi	Target kemiskinan menguntungkan anak perempuan termiskin	Pemberdayaan juru masak lokal (dominan perempuan), terdampak saat dana terlambat	Pencegahan obesitas remaja (relevan gender)
<b>Disabilitas</b>	Masih terbatas/tersebar	Perlu penguatan indikator disabilitas	Pedoman ada; implementasi bervariasi antar negara bagian	Peluang penguatan layanan disabilitas	Perlu penajaman SOP disabilitas	Perlu indikator disabilitas
<b>Adat/Budaya</b>	Adaptasi menu untuk komunitas adat	Identitas lokal & penerimaan budaya	Isu budaya lokal beragam	Relevansi lokal via kebun sekolah/komunitas	Pengadaan lokal; variasi menu regional	Kurikulum gizi + regulasi pangan

<b>Pengadaan inklusif</b>	≥30% dari petani (inklusif ekonomi)	Transparansi & keamanan pangan	Skala besar; ketergantungan pemasok lokal	Kebun sekolah & komunitas	Desentralisasi	Kontrak layanan digital
<b>Data terpilih &amp; M&amp;E</b>	Perluas disaggregasi gender-disabilitas	Ada praktik keterbukaan; perluas disabilitas	M&E kuat; perlu mitigasi diskriminasi	Cakupan luas; perlu data GEDSI	Perlu perbaikan mutu data	Studi & regulasi gizi tersedia

Diolah dari berbagai sumber\*

Secara lebih rinci, program makan gratis di **Brazil**, dikenal sebagai Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), PNAE dirancang untuk meningkatkan gizi anak-anak, mengurangi kelaparan, dan mendukung pendidikan dengan menyediakan makanan sehat di sekolah-sekolah. Makanan di sekolah harus memenuhi setidaknya 15% dari kebutuhan gizi harian siswa. Program ini menyediakan makanan di lebih dari 150.000 sekolah, dengan menu yang bervariasi seperti nasi, sayuran, daging, dan buah-buahan. Setiap siswa mendapatkan porsi makanan gratis yang disubsidi oleh pemerintah. Biaya per siswa untuk makanan ditanggung oleh anggaran pemerintah federal dan negara bagian dengan rincian biaya per kapita sekitar R\$1,5 (setara Rp4.400). Program ini merupakan contoh sukses dalam memerangi kemiskinan dan kelaparan melalui penyediaan makanan bergizi di lingkungan pendidikan.<sup>13</sup> Program tersebut diperluas untuk mencakup 40 juta anak di Brazil. Program dikelola secara profesional oleh 8000 ahli gizi, Pemerintah Brazil juga mewajibkan 30 persen bahan makanan yang disediakan di sekolah berasal dari hasil pertanian keluarga lokal.

<sup>13</sup> Silva et al, 2022.

Makan Gratis di Brazil. Sumber Foto: merdika.id

### Makan Gratis di Brazil yang bernama Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

- ▶ Memenuhi setidaknya **15%** dari kebutuhan gizi harian siswa.
- ▶ Menyediakan makanan di lebih dari **150.000 sekolah**, dengan menu yang bervariasi seperti nasi, sayuran, daging, dan buah-buahan.
- ▶ Dikelola secara profesional oleh **8000 ahli gizi** dan mewajibkan **30%** bahan pangan berasal dari hasil pertanian keluarga lokal.





Makan Gratis di India. Sumber Foto: leaglesamiksha.com

Program makan siang di **India** dikenal sebagai “Mid-Day Meal” (MDM) yang dilatarbelakangi oleh kekurangan gizi pada jenjang anak sekolah. India dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat kurang gizi yang tinggi, dengan empat dari sepuluh anak mengalami kurang gizi. Pemerintah India kemudian meluncurkan program makan siang gratis pada tahun 1995 untuk meningkatkan kehadiran sekolah dan bertujuan mengurangi kelaparan, program ini mencakup 125 juta anak di sekolah negeri serta sekolah bantuan pemerintah.<sup>14</sup>

Program ini melibatkan kerja sama antar kementerian dan lembaga swadaya masyarakat diantaranya Kementerian Pendidikan, Kementerian Sosial, dan Kementerian Pertanian. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan meningkatkan efektivitas distribusi makanan. Sebanyak 30% pengadaan makanan harus disuplai dari kelompok tani lokal guna mendukung ekonomi lokal dan memastikan keberagaman gizi. LSM yang membantu dalam implementasi Mid Day Meal Scheme (MDMS) diantaranya Akshaya Patra Foundation, Nandi Organization, dan Annamrita. Setiap LSM memiliki tugas dan fungsinya masing-masing guna mengimplementasikan program yang lebih efektif dan menjangkau lebih banyak anak-anak di seluruh negeri.<sup>15</sup>

Pemerintah India mengalokasikan dana untuk program ini dan memastikan dana tersebut digunakan sepenuhnya untuk memberi makan anak-anak. Implementasi di lapangan diserahkan kepada badan pemerintah lokal, organisasi guru dan murid, hingga lembaga swadaya masyarakat. Sementara itu, Afrika Selatan fokus pada penargetan pengentasan kemiskinan, Ghana memiliki kerangka desentralisasi yang kuat, serta Chile fokus pada kerentanan dan pencegahan obesitas.

<sup>14</sup> MD Asraul Hoque, 2024.

<sup>15</sup> Tattwamasi Paltasingh & Prakash Blue, 2022.

Praktik baik dari sejumlah negara tersebut dapat menjadi peluang untuk diimplementasikan dalam program MBG ke depan, salah satunya dengan menerapkan pengadaan yang inklusif untuk memperkuat petani lokal dan UMKM, menu yang disesuaikan dengan budaya pangan lokal serta kandungan gizi yang sesuai dengan penerima manfaat khususnya penyandang disabilitas, menyediakan data terpisah untuk memprioritaskan daerah dan sekolah dengan tingkat kemiskinan ekstrem, serta pelibatan semua unsur masyarakat dalam proses bisnisnya.



Kebijakan pemerintah Brasil yang mewajibkan setidaknya 30 persen bahan pangan program makan gratis bersumber dari petani lokal. Sumber Foto: merdika.id

Namun demikian, sejumlah risiko yang mungkin terjadi perlu untuk dimitigasi, salah satunya aksesibilitas penyandang disabilitas dalam program, menguatnya diskriminasi pada kelompok perempuan sebagai penyedia dan penerima manfaat, serta sulitnya mengakses ketersediaan data terpisah untuk memperkuat jangkauan program.

# SIMPULAN DAN REKOMENDASI

## a. Simpulan

Prabowo Subianto selaku Presiden terpilih periode 2024–2029 merancang Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dikoordinasikan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai salah satu program unggulan untuk mempercepat perbaikan gizi anak-anak usia sekolah. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan dilakukan secara bertahap, menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah.<sup>16</sup> Program ini ditujukan membangun sistem ketahanan gizi nasional serta mewujudkan tata kelola gizi dengan menyediakan makanan bergizi setiap hari bagi siswa SD, SMP, SMA Sederajat, dan Santri untuk menurunkan angka stunting dan kekurangan gizi, serta meningkatkan konsentrasi belajar dan partisipasi sekolah.

Namun demikian, asesmen yang dilakukan terhadap program MBG dalam aspek GEDSI menunjukkan bahwa program ini masih berada dalam kategori **Gender Blind (Buta Gender)**. Kategori ini mengindikasikan bahwa program MBG tidak mempertimbangkan perbedaan kebutuhan dan pengalaman gender, sehingga berisiko memperkuat ketidakadilan yang sudah ada.

Dalam tahap pemilihan, uji tuntas, hingga persetujuan proyek, tidak dilakukan analisis yang mendalam terkait dengan kebutuhan kelompok perempuan dan anak perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya. Selain itu, dokumen perencanaan tidak diperkuat dengan data terpilah sehingga berisiko program menjadi tidak tepat sasaran dan memperkuat kesenjangan dan ketidakadilan yang sudah ada.

<sup>16</sup> BGN akan Memulai Program MBG Secara Bertahap. <https://www.bgn.go.id/news/ artikel/bgn-akan-memulai-program-mbg secara-bertahap>. Diakses pada 24 Juni 2025.

Temuan utama menunjukkan bahwa pada indikator **akses**, dokumen perencanaan MBG lebih menekankan pada aspek logistik dan pembentukan badan pengampu serta koordinasi institusi dibandingkan dengan mengidentifikasi kerentanan sosial dan hambatan berbasis gender. Selain itu, tidak ditemukan pemetaan hambatan akses fisik dan non fisik bagi siswa penyandang disabilitas serta perempuan dan anak perempuan dengan beban ganda.

Pada indikator **partisipasi**, tidak ditemukan desain dan perencanaan program dengan pelibatan kelompok perempuan dan anak perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya. Program MBG didasarkan pada agenda politik dan janji kampanye Presiden Prabowo yang bersifat *top-down* tanpa menganalisis kebutuhan masyarakat. Selain itu, jika pun terdapat partisipasi penyandang disabilitas dalam proses bisnisnya, sifatnya cenderung simbolik (tokenisme).

Pada indikator **kontrol**, kelompok perempuan dan anak perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan kelompok rentan lainnya tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan proyek. Forum pengambilan keputusan hanya didominasi pemerintah pusat, instansi pemangku, dan instansi kontributor tanpa pelibatan aktor atau unit yang menaruh perhatian terhadap aspek GEDSI. Selain itu, tidak terdapat mekanisme pengawasan dan pengaduan yang dapat dijangkau semua pihak dan bersifat inklusif.

Sementara itu, pada indikator **manfaat**, sasaran atau target program MBG masih sangat bersifat universal (siswa, santri, ibu hamil dan ibu menyusui) tanpa data terpisah berbasis gender, disabilitas, dan status sosial maupun ekonomi. Dalam dokumen perencanaan, tidak terdapat indikator yang menargetkan pengurangan ketimpangan gender dan sosial yang dapat memperburuk ketidakadilan yang sudah ada.

## **b. Rekomendasi**

Perlu upaya yang lebih progresif untuk menuju Gender Sensitive atau bahkan Gender Transformative dalam program MBG. Perlunya membangun mekanisme partisipasi publik yang formal, inklusif, dan representatif, terutama dengan melibatkan organisasi masyarakat sipil dan organisasi penyandang disabilitas sejak tahap perencanaan hingga

evaluasi program. Hal ini agar prinsip GEDSI terwujud dalam kebijakan dan pelaksanaan program MBG di semua wilayah.

Penguatan strategi GEDSI mutlak diperlukan seperti penyediaan data terpilah, mekanisme partisipasi yang inklusif dan bermakna, teknis distribusi makanan bagi penyandang disabilitas serta kandungan gizinya, dan integrasi indikator yang menargetkan pengurangan kesenjangan sosial dan gender. Pembenahan regulasi termasuk revisi petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) diperlukan agar aspek GEDSI benar-benar terwujud dalam praktik dan pengawasan MBG. Dalam aspek kontrol dan akuntabilitas penguatan juknis dan sistem monitoring sangat dibutuhkan untuk memastikan keterjangkauan dan pemerataan manfaat hingga ke kelompok paling rentan serta konstruksi kebijakan yang mengimplementasikan GEDSI yang lebih responsif. Secara lebih rinci, sejumlah rekomendasi berikut dapat diterapkan oleh pemangku kepentingan, diantaranya yaitu:

## **1. Pemerintah Pusat**

- Mendorong upaya yang lebih progresif dalam kebijakan dan regulasi yang responsif gender dan inklusif dalam setiap tahapan Proyek Strategis Nasional termasuk di dalamnya adalah program Makan Bergizi Gratis;
- Merumuskan ulang tata kelola program MBG sebagai turunan kebijakan dan regulasi yang ada, melalui studi yang komprehensif dan berperspektif GEDSI. Studi ini penting melibatkan akademisi dan organisasi masyarakat sipil – termasuk Organisasi Penyandang Disabilitas;

## **2. Badan Gizi Nasional**

- Membuat pengembangan Peta Jalan dan Pedoman Pengarusutamaan Gender dan Inklusi Sosial dalam program Makan Bergizi Gratis serta melibatkan perempuan dan penyandang disabilitas dalam posisi manajemen dan menggunakan temuan dalam kajian ini untuk melakukan evaluasi dan perbaikan program;
- Mengintegrasikan GEDSI dalam petunjuk teknis perencanaan dan tata kelola program MBG secara keseluruhan;

- Membentuk mekanisme transparansi program dan pengaduan responsif kelompok rentan – terutama penyandang disabilitas yang dapat diakses oleh seluruh masyarakat termasuk kelompok rentan;
- Menyusun indikator kinerja program berbasis GEDSI;

### **3. Dewan Perwakilan Rakyat RI**

- Menerapkan mekanisme pengawasan program sejak dalam tahap pemilihan proyek pemerintah untuk memastikan bahwa program mengakomodasi kebutuhan kelompok rentan secara konsisten;
- Menyusun instrumen pengawasan program MBG berperspektif GEDSI;
- Mempertimbangkan alokasi anggaran program MBG berdasarkan pengawasan dan evaluasi yang dilakukan;

### **4. Masyarakat Sipil** untuk terlibat aktif dalam perencanaan dan pengawasan serta memperkuat kontrol sosial terhadap program MBG.

# DAFTAR PUSTAKA

## **Dokumen Resmi/Laporan Lembaga dan Jurnal**

- Badan Gizi Nasional. (2024). *BCN akan memulai program MBG secara bertahap*. Retrieved June 24, 2025, from <https://www.bgn.go.id/news/artikel/bgn-akan-memulai-program-mbg-secara-bertahap>.
- Bappenas. (2024). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029*. Kementerian PPN/Bappenas.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.), SAGE Publications.
- Global Child Nutrition Foundation. (2024). *State of School Feeding Worldwide Report*. <https://gcnf.org>.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024). *Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 dalam angka*. Retrieved June 26, 2025, from <https://repository.badankebjakan.kemkes.go.id/id/eprint/5861>.
- UNICEF Innocenti. (2020). *Gender-responsive, age-sensitive social protection*. Retrieved May 19, 2025, from <https://www.unicef.org/innocenti/media/6086/file/UNICEF-Gender-Responsive-Age-Sensitive-Social-Protection-2020.pdf>.
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. <https://sdgs.un.org/2030agenda>.
- United Nations. (2015). *Transforming our world: The 2030 Agenda for Sustainable Development*. United Nations.
- Survei Status Gizi Indonesia (SSGI). (2024). *Hasil Studi Status Gizi Indonesia*. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

## **Daftar Peraturan Perundang-Undangan**

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2024). *Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025.*

Kementerian Sosial Republik Indonesia. (2023–2025). *Dokumen dan publikasi terkait perlindungan sosial dan penyandang disabilitas.*

Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan DAK Nonfisik Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian Tahun Anggaran 2025.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2024 tentang Pembentukan dan Penunjukan Badan Gizi Nasional.

## **Bahan Paparan/Presentasi**

Badan Gizi Nasional. (2024, November 24). Bahan Paparan Badan Gizi Nasional. Policy and Implementation of the Nutritious Lunch Program: Pada Acara Diskusi Tematik Perencanaan, Penganggaran, dan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis-APEKSI.

Badan Sertifikasi Nasional (BSN). (2025, Februari 11). Bahan Presentasi Badan Sertifikasi Nasional (BSN): Pada Webinar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang Aman dan Sehat melalui Penerapan SNI. Direktorat Jenderal Perbendaharaan-Direktorat Pelaksanaan Anggaran. (2023, Oktober).

Bahan Paparan Direktorat Pelaksanaan Anggaran: Pada Bimbingan Sistem Akuntansi Instansi Tahun 2023-Belanja Bantuan Pemerintah Pada Kementerian/Lembaga. Center for Indonesia's Strategic Development Initiatives (CISDI). (2025).

Paparan Audiensi CISDI bersama F-PDIP DPR RI. Pentingnya Penguatan Tata Kelola, Regulasi, Monitoring dan Evaluasi Pada Program Makan Bergizi Gratis.

Paparan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Badan Gizi Nasional (BGN) dengan Komisi IX DPR RI. 6 Mei 2025.

Paparan Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dengan Komisi IX DPR RI. 16 Mei 2025.

## Laman Media

- KBR. (2024). *Penyandang disabilitas dijanjikan dapat makan bergizi gratis 2 kali sehari.* Retrieved June 24, 2025, from <https://kbr.id/articles/indeks/tahun-depan-penyandang-disabilitas-dijanjikan-dapat-makan-bergizi-gratis-2-kali-sehari>.
- Kompas. (2025, March 3). *Ini daftar lengkap 77 proyek strategis nasional 2025–2029.* Retrieved June 24, 2025, from <https://www.kompas.com/properti/read/2025/03/03/143000021/ini-daftar-lengkap-77-proyek-strategis-nasional-2025-2029>.
- Validnews. (2025, September 27). *BGN minta tambah Rp28 T, anggaran MBG 2025 sentuh Rp99 T.* Retrieved September 27, 2025, from <https://validnews.id/ekonomi/bgn-minta-tambah-rp-t-anggaran-mbg-sentuh-rp-t>.